

KONTEKSTUALISASI TEOLOGI ḤASAN ḤANAFĪ TERHADAP PROBLEM KORUPSI DI INDONESIA

Masduri

Pengelola Laskar Ambisius (LA) dan Direktur Gerakan UIN Sunan
Ampel Menulis (GISAM) Surabaya,
E-mail: masduri_as@yahoo.co.id

Abstract: This article wants to present a reconstruction of theological thought of Ḥasan Ḥanafī as a base idea of contextualization to the problem of corruption in Indonesia. Theology of Ḥasan Ḥanafī is the liberative theology which direct human to make the teaching of theology as the spirit of value in life. So that all the problems of life, in particular corruption taking root in Indonesia can be resolved properly through the building of anti-corruption theology. The urgency of anticorruption theology, is a manifestation of a communal dream about a developed and prosperous Indonesia. Moreover, as a shared commitment of Muslims to show the world that Islam is truly a mercy to the worlds, which moves its adherents to really be able to implement commanding the good and forbidding the evil.

Keywords: Anti-corruption, corruption, theology, commanding the good and forbidding the evil.

Pendahuluan

Korupsi menjadi fenomena yang menarik perhatian publik. Lantaran efek buruk dari perilaku korupsi sangat nyata bagi kesejahteraan hidup bersama. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptus*. Artinya adalah tindakan yang merusak atau menghancurkan. Secara umum, pengertian korupsi disesuaikan dengan konteks bidangnya masing-masing. Jika korupsi dalam perspektif moral, berarti segala sesuatu yang merusak atau yang bertentangan dengan moral. Pada ranah hukum, korupsi berarti sesuatu yang melanggar hukum. Atau pada konteks politik, yang selama ini sering menghiasi wajah media, korupsi berarti penyalahgunaan

wewenang atau kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya.¹

Secara terminologi Islam, Sayyid Husein Alatas berpandangan bahwa korupsi merupakan perbuatan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan cara pencurian atau penipuan.² Azyumardi Azra secara praktis, memberikan pengertian bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab.³ Korupsi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama, lantaran hal itu merupakan bentuk perusakan terhadap hak-hak negara dan masyarakat.

Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang mengancam kesejahteraan seluruh elemen bangsa. Buktinya bisa dilihat di Indonesia, korupsi telah benar-benar menjadi pengacau kehidupan berbangsa-bernegara. Lantaran korupsi kesejahteraan rakyat menjadi terkatung-katung, pembangunan infrastruktur tidak jelas rimbanya, ketidakadilan semakin marak, dan tindakan kriminal semakin sering terjadi, sebab masyarakat semakin sulit mendapatkan kesejahteraan. Banyak di antara mereka yang melakukan pencurian, penjabretan, dan perampokan sebab dililit oleh persoalan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sedangkan elit pemerintah di atas, tidak ada putus-putusnya melakukan pengorupsian terhadap uang negara. Di tengah penderitaan rakyat yang semakin akut, elit pemerintah belum sadar juga. Mereka terus mereproduksi pengorupsian uang negara dari beragam bentuknya.⁴

¹ Reza A.A. Wattimena, *Filsafat Anti-korupsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 8.

² Dalam bentuknya yang berfilsafat memaksa, korupsi disertai dengan kekerasan. Pelaku korupsi tidak bersikap terbuka mengenai kepentingan dan tindakannya, mereka seperti malu-malu. Karena tindakan korupsi memang tindakan memalukan, yang tidak mungkin disampaikan atau diperlihatkan di depan publik. Baca Sayyid Husein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi* (Jakarta: LP3S, 1987), 225.

³ Pandangan Azyumardi Azra ini dikutip tanpa judul buku dan halaman dalam Ulul Albab, *A to Z Korupsi: Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi* (Surabaya: Jaringan Pena, 2009), 188.

⁴ Masduri, "Jalan Terakhir "Menebas Leher" Koruptor", *Duta Masyarakat*, (10 Desember 2012), 5.

Reproduksi korupsi yang dilakukan oleh elit pemerintah bisa kita lihat di media, betapa kejahatan korupsi selalu menjadi berita aktual yang menarik untuk didalami lebih jauh. Korupsi menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan.⁵ Pemberitaan korupsi di media hampir setiap hari ada. Kejahatan kerah putih ini hadir dalam beragam bentuk, mulai perorangan, kerja sama, bahkan ada rekayasa partai politik di balik perilaku korupsi tersebut. Sungguh korupsi sekarang ini menjadi penyakit akut bangsa Indonesia, yang jika dibiarkan akan menghancurkan Indonesia.

Ketidakefektifan mereka untuk berbuat korupsi membuktikan bahwa hukuman yang diberikan tidak berhasil. Hukum belum membuat mereka berhenti untuk melakukannya. Seakan tinggal di penjara justru sangat menyenangkan dibanding di luar penjara. Mereka pun sepertinya berlomba-lomba untuk melakukan korupsi dan merampas uang negara.⁶ Apalagi, hukuman bagi koruptor yang hanya berkisar antara tiga hingga empat tahun. Kemudian bila sudah menjalani hukuman hingga dua per-tiganya, mereka berkesempatan menghirup udara bebas secara bersyarat. Belum lagi bila mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman. Kondisi ini jelas tidak adil. Sebab mereka merampok uang negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar, tapi hanya dihukum tidak lebih dari lima tahun, sehingga banyak orang yang ingin melakukan hal serupa.

Kita makin tambah prihatin dengan hasil survei KPK tahun 2012 lalu. Sebab, dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kementerian Agama (Kemenag) menempati peringkat pertama sebagai instansi paling korup.⁷ Bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Fakta ini tentu mengejutkan kita semua. Karena Kementerian Agama yang seharusnya menjadi panutan dan

⁵ Selama ini semua elemen bangsa terus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan korupsi, maka Islam sebagai agama terbesar penganutnya juga harus bertanggung jawab atas persoalan korupsi. Jika tidak, Islam hanya akan menjadi agama tanpa fungsi, yang tidak mampu mencerahkan kehidupan berbangsa-bernegara, baca dalam M. Helmi Umam, "Pandangan Islam Tentang Korupsi" *Jurnal Teosofi*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2013), 463.

⁶ Masduri, "Koruptor Generasi Gayus", *Republika*, (12 Desember 2012), 5.

⁷ *Ibid.*, 5

contoh bagi instansi lain dalam melakukan perbuatan baik, justru terindikasi lebih korup dibandingkan kementerian lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia masih jauh dari nilai-nilai esensial yang diajarkan dalam agama. Jika dulu tokoh agama sering mengkritik pemerintah, sekarang saatnya mereka melakukan gebrakan baru berupa internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap pemeluknya.⁸ Agama hadir tidak lain untuk menciptakan perdamaian, cinta kasih, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam pandangan Ḥasan Ḥanafī, keyakinan keagamaan atau teologi disebut sebagai kerja emosional yang di dalamnya seseorang menyatukan segala kekuatan dan kemampuannya menuju hakekat yang satu, mutlak, menyeluruh dan suci. Kemudian melakukan transformasi sosial sehingga keyakinan teologis dalam Islam bisa hadir secara praksis dalam tindakan nyata.⁹ Bukan sekadar keyakinan teologis yang melangit tetapi tidak menyenyuh ke bumi. Ḥanafī menekankan pentingnya pembacaan umat Islam terhadap teologi Islam sebagai gerakan yang mampu diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian agama hadir bukan sekadar sebagai keyakinan teologis yang hambar makna kehidupan duniawi, di mana hari ini manusia sedang berpijak di dalamnya sebagai *Khalifah* Allah.

Semestinya teologi dibangun atas dasar kemanusiaan. Teologi tidak boleh melangit, melainkan harus menyentuh ke bumi sebagai landasan hidup yang menggerakkan. Bagi Ḥanafī ungkapan tentang sifat-sifat Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Mutlak yang seringkali terlontar dari para agamawan, tidak penting lagi diungkapkan. Sebab Tuhan tanpa penyucian manusia, tetaplah Maha Sempurna dan Mutlak. Penggambaran Tuhan yang demikian, membuat kita sulit mendekat pada Tuhan. Bahkan pada tataran tertentu

⁸ Ibid., 5.

⁹ Gerakan teologi modern lebih menekankan pemikirannya pada teologi praktis ketimbang teologi teoretis, dengan mengubah teologi sebagai kekuatan yang aktif dalam menggerakkan kehidupan kemanusiaan yang bermartabat. Hassan Hanafi, *Dari Akidah ke Revolusi: Sikap Kita terhadap Tradisi Lama*, terj. Asep Usman Ismail (Jakarta: Paramadina: 2003), 15.

mbingungkan akal manusia, serta melemahkan imajinasi tentang kehidupan.¹⁰

Banyak gagasan rekonstruksi teologi yang selama ini sering dilakukan oleh Hasan Hanafi, seperti tafsir terhadap enam sifat Tuhan, *Wujūd, Qidam, Baqā', Mukhālafatuh li al-Hawādith, Qiyāmuh bi nafsih, dan Wahdānīyah*.¹¹ Pemaknaan Hanafi terhadap sifat-sifat tersebut jika dikontekstualisir dengan problem korupsi yang melanda bangsa ini sangat relevan.

Biografi Intelektual Hasan Hanafi

Hasan Hanafi merupakan intelektual Islam kontemporer yang punya pengaruh besar dalam diskursus teologi Islam. Sejarah telah mencatat kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer dalam merespon dinamika kehidupan mutakhir. Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir.¹² Ia merupakan keturunan dari Suku Berber dan Badui di Mesir.¹³ Setelah memasuki usia lima tahun, ia belajar mengaji al-Qur'ân pada Shaikh Sayyid sebagai seorang ulama masa itu. Pendidikan dasarnya ia lalui di Madrasah Sulaymân Gawiyyh. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah guru, bernama al-Mu'allimîn. Tetapi menginjak kelas lima Hanafi pindah ke Madrasah al-Silahdâr.¹⁴

¹⁰ Hanafi, *Dari Akidah ke Revolusi*, xxviii.

¹¹ Hassan Hanafi, "Ideologi dan Pembangunan" dalam Shonhaji Soleh (ed.), *Agama, Ideologi, Pembangunan* (Jakarta: P3M, 1991), 53-63.

¹² M. Faisol, "Menyikapi Tradisi: Membaca Proyek Pemikiran Kiri Islam" dalam Wasid (ed.), *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaharuan dalam Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2011), 23. Baca juga sumber sejarah tentang biografi Hassan Hanafi, dalam M. Ridwan Hambali, "Hassan Hanafi: Dari Kiri Islam, Revitalisasi, hingga Oksidentalisme" dalam M. Aunul Abied Shah (et. al.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 220. Baca pula dalam Ensiklopedia Bahasa Inggris "Hassan Hanafi" dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Hanafi, diakses pada tanggal 9 Mei 2014.

¹³ Dalam catatan Issa J. Boullata (1995) seperti dikutip Azyumardi Azra, *Menggugat Tradisi Lama, Menggapai Modernitas: Memahami Hassan Hanafi*, dalam Kata Pengantar *Dari Akidah ke Relovusi*, xvi.

¹⁴ Faisol, "Menyikapi Tradisi", 24.

Ḥasan Ḥanafī terus melanjutkan pendidikannya, tingkatan berikutnya tempat ia belajar adalah Madrasah Tsanawiyah Khalil Agha. Pada sekolah itu, Ḥanafī menekuni dua bidang kajian, *pertama* bidang kebudayaan yang ia lalui selama empat tahun, kemudian yang *kedua* bidang pendidikan yang ia lalui selama satu tahun.¹⁵

Semenjak SMP, Ḥasan Ḥanafī sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi. Muncul kesadaran nasionalisme dalam dirinya. Bersama sahabat-sahabatnya, Ḥanafī sempat bersama-sama pergi ke Asosiasi Pemuda Muslim untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan perang. Namun keinginannya itu tidak disambut positif oleh mereka. Bahkan Ḥanafī dan sahabat-sahabatnya diminta untuk bergabung ke Batalion Aḥmad Ḥusīn. Peristiwa ini membangkitkan kesadaran mendalam bagi Ḥanafī tentang realitas politik yang dihadapinya. Ia menjadi sadar, bahwa ternyata friksi kepartaian lebih dominan dari pada persoalan kebangsaan yang menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁶

Atas dorongan kesadaran nasionalisme dalam dirinya, Ḥasan Ḥanafī semakin antusias mengikuti perkembangan dinamika politik di Timur Tengah waktu itu, terutama tentang pembebasan Palestina. Perjuangan para pahlawan yang wafat dalam medan tempur semakin membangkitkan jiwa perjuangannya. Ḥanafī mulai membuka cakrawala berpikrinya, hingga waktu itu mulai muncul gagasan-gagasan rekonstruksi teologi. Ḥanafī berpandangan bahwa bumi adalah “Tuhan Baru”, yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Ḥanafī secara tegas menjelaskan, bahwa gagasan tentang “Teologi Tanah” telah muncul jauh saat sebelum ia berada di Amerika.¹⁷ Hanya saja karena waktu itu cakrawala pengetahuannya masih terbatas, ia belum berpikir banyak tentang proyek besarnya mengenai *al-Turāth wa al-Tajdīd* (tradisi dan pembaruan).

Seiring berjalannya waktu, saat sekolah SMU Ḥasan Ḥanafī sudah mulai mengenal al-Ikhwān al-Muslimūn. Ia sempat mengikuti

¹⁵ Ibid., 24

¹⁶ Hassan Ḥanafī, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As’ad Irsyady dan Muflīha Wijayati (Yogyakarta: Islamika, 2003), 2-9.

¹⁷ Ibid., 9.

orientasi pembekalan al-Ikhwân al-Muslimûn, yang secara langsung disampaikan oleh tokoh fenomenal al-Ikhwân al-Muslimûn, Hasan al-Bannâ. Hanya saja waktu itu Ḥanafî belum punya perhatian serius terhadap isu-isu dan gerakan yang dilakukan oleh al-Ikhwân al-Muslimûn. Tetapi kemudian Ḥanafî resmi menjadi anggotanya pada tahun 1952 ketika terjadi Revolusi Mesir. Bergabungnya Ḥanafî pada al-Ikhwân al-Muslimûn membuat dirinya semakin bergairah menjalankan banyak aktivitas.¹⁸

Pada saat masuk kuliah di Universitas Kairo Mesir, Ḥasan Ḥanafî masuk sebagai anggota al-Ikhwân. Secara aktif ia banyak berkecimpung dalam gerakan-gerakan yang dikakukan oleh teman-teman al-Ikhwân di kampusnya. Ia sempat menjadi aktor utama kampanye dalam pemilihan senat mahasiswa untuk mendorong mahasiswa agar memilih calon dari al-Ikhwân. Hingga saat itu, perolehan suara dari al-Ikhwân mencapai 90 persen. Saat kemenangan berada di tangan mahasiswa al-Ikhwân, Ḥanafî begitu terharu. Teman-temannya meneriakkan *Allâh Akbar wa li Allâh al-Ḥamd* (Allah Maha Besar dan bagi-Nya segala puji). Sementara terhadap kompetitor utamanya dalam pemilihan senat mahasiswa kala itu, Ḥanafî begitu muak terhadap para mahasiswa Komunis, yang dengan lantang sering meneriakkan “Hidup Mesir” dan “Hidup Rakyat”.¹⁹ Sesuatu yang kini oleh Ḥanafî terus diperjuangkan.

Ḥasan Ḥanafî selama menjadi mahasiswa di Jurusan Filsafat Fakultas Adab Universitas Kairo Mesir, punya prestasi akademik yang baik.²⁰ Keterlibatannya dalam banyak aktivitas al-Ikhwân, tidak menjadikan Ḥanafî lupa diri terhadap tugas akademiknya. Hampir semua makalah-makalah yang ia tulis mendapatkan nilai *summa cum laude*. Salah satunya tulisan tentang “Teori Pengetahuan dan Kebahagiaan menurut al-Ghazâlî”.²¹ Tetapi juga tidak sedikit pula pengalaman kurang baik ia terima, lantaran sikap dosennya yang kurang terbuka. Karena dalam setiap makalah atau jawabannya ketika ujian, Ḥasan Ḥanafî sering menyantumkan pemikiran-pemikiran

¹⁸ Ibid., 17-18.

¹⁹ Ibid., 19.

²⁰ Ridwan, “Hassan Ḥanafî: Dari Kiri Islam”, 220.

²¹ Ḥanafî, *Aku Bagian*, 23.

pribadinya mengenai beberapa pandangannya terkait dengan masalah yang dibahas atau diujikan.²²

Kasus menarik yang perlu kita pahami bersama saat Ḥasan Ḥanafī menjadi mahasiswa yang kemudian menjadi salah satu geneologi lahirnya gagasan-gagasan konstruktif-revolusioner, adalah ketika Ḥasan Ḥanafī menuliskan surat kepada rektornya atas permasalahannya dengan dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab. Dalam tulisan surat tersebut, Ḥanafī tidak menyantumkan gelar profesor sang rektor dengan alasan bahwa setiap manusia itu sama. Bahkan Nabi Muhammad, dengan tegas menyampaikan persamaan manusia. Karena alasan inilah, dengan sangat berani ia melakukannya. Tentu saja atas tindakannya ini, Ḥanafī mendapat teguran keras oleh penjaga ruangan rektor hingga sampai membawanya disidang oleh enam dosen, yang pada akhirnya membuat ia gagal dinobatkan sebagai mahasiswa dengan predikat *summa cum laude*.²³

Lantaran kegagalannya mendapatkan lulusan Universitas Kairo dengan predikat *summa cum laude*, Ḥanafī kehilangan salah satu cita-citanya untuk mendapatkan beasiswa ke Universitas Sorbonne.²⁴ Tetapi semangatnya yang besar, membuat Ḥanafī tegar menghadapi semua itu. Hingga akhirnya dengan keberanian dan semangatnya, ia memutuskan kuliah di Universitas Sorbonne dengan biaya sendiri. Diiringi tangisan keluarga, Ḥanafī meninggalkan Mesir pada tanggal 11 Oktober 1965 dan tiba di Marsiele pada tanggal 17 Oktober 1965. Saat berangkat ke Prancis, Ḥanafī hanya membawa bekal sekeping keju dan susu bantuan Amerika Serikat yang dibagi-bagikan di sekolah kala itu, serta uang LE 10,000 pund Mesir.²⁵

Saat awal berangkat ke Prancis usianya 21 tahun, kemudian pada usia 31 Tahun Ḥasan Ḥanafī kembali lagi ke Mesir,²⁶ dengan membahwa kebanggaan luar biasa karena ia telah lulus master dan doktor di Universitas Sorbonne Paris. Sejak belajar di Paris, pemikiran

²² Ibid., 25-26.

²³ Ibid., 27.

²⁴ Ibid., 29.

²⁵ Ibid., 28

²⁶ Ibid., 30.

Ḥasan Ḥanafī berkembang pesat, hingga menghasilkan Disertasi setebal 900 halaman dengan judul “L Exegeses de la Phenomenologie Letat Actuel de la Methode Phenomenologie et Son Application an Phenomena Religuex”.²⁷ Disertasi monumental tersebut merupakan upaya Ḥanafī untuk menghadapkan ilmu ushul fiqh pada mazhab fenomenologi Edmund Husserl. Disertasi ini disambut baik oleh akademisi Mesir, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai karya terbaik di Mesir pada tahun 1961.²⁸ Pencapaian ini semakin menguatkan posisi Ḥanafī sebagai pemikir Islam kontemporer yang punya pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam.

Problem Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia menjadi masalah yang akut, dari dulu hingga kini korupsi masih saja mewarnai perjalanan pemerintahan di Indonesia. Korupsi sudah menjadi bagian dari gerak nadi pemerintahan, lantaran mereka tidak punya semangat yang besar dalam upaya kesejahteraan rakyat. Korupsi di Indonesia lahir selain karena miskinnya integritas, mereka terlalu tamak pada kekayaan, sehingga tanpa berpikir benar atau salah, pencurian terhadap uang negara sudah menjadi hal biasa. Korupsi terjadi di semua lini kehidupan, dari tingkat bawah sampai elit pemerintahan.

Lantaran korupsi kesejahteraan rakyat menjadi terkatung-katung, pembangunan infrastruktur tidak jelas rimbanya, ketidakadilan semakin marak, dan tindakan kriminal semakin sering terjadi, lantaran masyarakat semakin sulit mendapatkan kesejahteraan. Banyak di antara mereka yang melakukan pencurian, penjabretan, dan perampokan sebab dililit oleh persoalan ekonomi yang tak kunjung membaik. Sedangkan elit pemerintah di atas, tidak ada putus-putusnya melakukan

²⁷ Suhermanto Ja'far, “Kiri Islam dan Ideologi Kaum Tertindas: Pembebasan Keterasingan Teologi menurut Hassan Hanafi”, *Jurnal Al-Afkar*, Edisi V, Tahun ke 5 (Januari-Juni 2002), 179.

²⁸ Abdurrahman Wahid, “Hassan Ḥanafī dan Eksperimentasinya”, dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: antara Modernitas dan Posmodernisme; Telaah Kritis Pemikiran Hassan Ḥanafī*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke-7, 2004), viii.

pengorupsian uang negara. Di tengah penderitaan rakyat yang semakin akut, elit pemerintah belum sadar juga. Mereka terus mereproduksi pengorupsian uang negara dari beragam bentuknya.²⁹

Jika dilacak secara mendalam kemunculan korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, mulai dari masa VOC, Pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga masa Indonesia merdeka di bawah kepemimpinan Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Perjalanan panjang yang dilalui bangsa ini telah memberi warna keruh dengan munculnya berbagai macam problem korupsi. Sebagai upaya agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang korupsi di Indonesia, berikut sejarah singkat perjalanan bangsa Indonesia sejak pra sampai pasca kemerdekaan dalam hal korupsi.

Sejak masa VOC, korupsi telah tumbuh subur di negeri ini. Bahkan organisasi dagang yang dulu pernah berjaya itu runtuh karena persoalan korupsi di internal lembaganya.³⁰ Korupsi di kalangan VOC terjadi karena ketidakpuasan pegawainya atas gaji yang diterimanya. Minimnya gaji yang diterima pegawai tersebut lantaran VOC lebih dimonopoli oleh para elit, sehingga para pegawai yang tidak puas dengan gajinya yang minim banyak melakukan pencurian atau pengorupsian kekayaan VOC.³¹ Akibat berbagai tindakan pengorupsian tersebut, VOC mengalami kerugian besar-besaran, hingga organisasi dagang tersebut bangkrut dan bubar.

Setelah penjajahan Belanda, Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang keadaan Indonesia tak juga lebih baik dari penjajahan Belanda. Bahkan bisa dikatakan, penjajahan Jepang yang hanya 3,5 tahun sama penderitannya dengan penjajahan Belanda yang mencapai 3,5 abad. Korupsi pada masa Jepang juga masih menggurita. Apalagi pada masa Jepang terjadi kekacauan ekonomi besar-besaran, sehingga korupsi semakin merebak di mana-mana. Selain itu, ambisi Jepang yang sangat besar dalam memenangi perang di kawan

²⁹ Masduri, "Jalan Terakhir", 5.

³⁰ Eggi Sujana, *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati* (Surabaya: JP Books, 2008), 5.

³¹ Albal, *A to Z Korupsi*, 96.

Asia juga punya pengaruh besar terhadap korupsi, karena dalam perang tentu butuh materi yang cukup. Akibatnya Jepang banyak mengabaikan pelayanan administrasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.³²

Pada masa kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia sebenarnya punya harapan besar tentang kesejahteraan rakyatnya. Misalnya kita dapat melihat semangat itu dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas mengimpikan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang berdaulat, adil, dan makmur tentu hanya bisa dicapai melalui pemerintah yang bersih dan punya visi besar ke depan tentang kemajuan bangsa. Harapan besar waktu itu bertumpu pada Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi tentu tidak mudah menhancurkan kebiasaan korupsi elit pemerintah yang sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda.

Dalam catatan Ulul Albab, ada dua hal yang mempengaruhi mengapa korupsi masih tumbuh subur di era ini. *Pertama*, pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang banyak dikuasai Asing. Tindakan progresif ini semestinya punya pengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi malah disalahgunakan oleh militer dengan manajemen yang tidak terkontrol, sehingga praktik korupsi tak terhindarkan. *Kedua*, pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan politik benteng, sebuah kebijakan yang seharusnya membentengi para pengusaha dalam negeri, tetapi malah disalahgunakan dengan kongkalikong dan korupsi, sehingga banyak tindakan mereka yang merugikan rakyat.³³

Pada awal kepemimpinan Orde Baru di bawah Suharto, harapan baru tentang pemberantasan korupsi kembali muncul, namun harapan itu pupus seiring berlalunya waktu. Dalam perkembangannya, pemerintahan Suharto memang banyak melakukan pembangunan ekonomi makro, tetapi pada satu sisi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang biak sedemikian rupa. Pada tahun 1998, *Corruption*

³² Ibid., 108.

³³ Ibid, 120.

Perception Index dari *Transparency International* menempatkan Indonesia pada posisi ke 80 dari 85 negara. Dari data tersebut Indonesia dalam persepsi konsultan dan pelaku bisnis merupakan bagian besar dari negara-negara terkorup. Selain itu, dalam survei yang dilakukan oleh Konsultasi Rasio Ekonomi dan Politik berbasis di Hongkong pada tahun 1997 menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia.³⁴

Korupsi pada masa Orde Baru sangat beragam, mulai dari suap terhadap birokrat, politisi, dan pejabat pemerintah. Selain dalam bentuk suap, penggelembungan anggaran untuk mendapatkan keuntungan berbagai proyek pemerintah juga marak. Salah satu yang sangat tampak waktu itu adalah mudahnya akses keluarga Suharto dan orang-orang terdekatnya dalam mengakses berbagai kesempatan bisnis. Urusan bisnis milik keluarga Cendana sangat mudah, sehingga kekayaan keluarga Suharto begitu luar biasa, karena pusat-pusat perekonomian berada di bawah kekuasaannya.

Korupsi yang menggurita pada masa Suharto tidaklah langgeng, meski Suharto berkuasa sangat lama hingga 32 tahun, namun akhirnya Suharto tetap tumbang. Setelah mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran, tepat pada tanggal 21 Mei 1998 Suharto lengser. Lengsernya Suharto tidak saja memberi harapan baru dalam bidang korupsi, tetapi juga dalam banyak hal. Karenanya, kelengseran Suharto menandai era baru, sebuah era yang membuka sekat-sekat kebebasan, sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan berekspresi secara bebas tanpa intervensi dari siapapun. Era itu biasa kita sebut Era Reformasi, era yang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai tumpuan setiap pembangunan bangsa dan negara. Era Reformasi diprakarsai oleh mahasiswa, sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamantkan dalam pembukaan UUD 1945.³⁵

³⁴ Ibid, 121.

³⁵ Keberhasilan mahasiswa melengserkan Suharto dari kursi kepresidenannya merupakan bagian dari tugas mahasiswa sebagai *gent of change*, *agent of control*, *iron stock* dan *avant garde*. Baca Masduri, "Reformasi Kacau Balau", *Sinar Harapan*, (23 Mei 2012), 3.

Kehadiran Habibie menggantikan Suharto dalam panggung kepemimpinan nasional juga tak membuahkan hasil maksimal. Apalagi Habibie terkesan ragu-ragu menindak tegas korupsi yang dilakukan keluarga Suharto, sehingga gurita korupsi masih saja merajalela. Tetapi setelah itu greget melakukan perang terhadap korupsi semakin keras dengungunya. Misalnya, cita-cita Habibie ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, yang jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun dunia politik Indonesia waktu itu belum stabil, sehingga menjadi sulit bagi Habibie melakukan berbagai kebijakannya secara tegas, karena dukungan terhadap Habibie sebagai presiden terasa masih setengah-setengah. Dukungan yang tidak penuh terhadap pemerintahan Habibie, menjadi bumerang tersendiri bagi dirinya.³⁶

Habibie turun dari jabatannya sebagai Presididen RI, hadir Gus Dur yang terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI ke 4. Tampilnya Gus Dur dalam panggung politik nasional juga memunculkan harapan besar tentang pemberantasan korupsi. Selama ini Gus Dur dikenal sebagai tokoh prodemokrasi yang sangat getol menolak korupsi. Tetapi jalan di pemerintahan tidak mudah. Politik itu cair dan sulit diduga. Karenanya, usaha Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) akhirnya tidak berjalan mulus, karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak lazim. Tetapi kita secara nyata dapat menangkap *greget* Gus Dur dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi.³⁷ Meski akhirnya Gus Dur harus lengser dari kursi kepresidenannya karena permainan politik yang kurang sehat.

Harapan-harapan baru selalu muncul setiap kali hadir presiden baru. Kehadiran Megawati yang menggantikan Gus Dur juga tak lepas dari harapan itu. Apalagi selama ini Megawati dikenal sebagai tokoh yang sangat getol memusuhi Orde Baru, sehingga besar harapan Megawati mampu melakukan tindakan besar-besaran dalam pemberantasan korupsi. Tetapi nyatanya pada masa Megawati korupsi masih berkembang biak. Namun Megawati telah berhasil memulai

³⁶ Albab, *A to Z Korupsi*, 133.

³⁷ *Ibid.*, 139-140.

langkah besar dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hingga kini taringnya masih kita rasakan.³⁸

Kita patut mengapresiasi warisan pemerintahan Megawati. KPK kini telah melalap banyak koruptor kakap. Kehadiran KPK memberi harapan baru tentang masa depan Indonesia. Maka kita akan melihat, bagaimana pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan SBY sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY hadir dengan semangatnya dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain mengaktifkan KPK secara masif, SBY pada tahun 2005 juga membentuk Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Kedudukan Timtas Tipikor ini di bawah koordinasi langsung Presiden, sehingga mereka harus bertanggung jawab secara langsung, sedangkan KPK menjadi lembaga independen di luar koordinasi presiden.³⁹

Era keterbukaan di masa kepemimpinan SBY memberikan peluang yang besar bagi terbukanya sistem pemerintahan yang bersih. Kita bisa benar-benar menyaksikan paradoks antara Era Orde Baru dengan Era Reformasi pada masa pemerintahan SBY. Sehingga kontrol dari masyarakat, pengamat, dan semua elemen kebangsaan benar-benar hadir. SBY sebagai presiden juga sangat menghargai kebebasan berpendapat. Tindakan SBY ini sebenarnya merupakan implementasi dari semangat dasar negara yakni UUD 1945. Sebab negara demokrasi ini dibangun atas dasar kebebasan berekspresi, sehingga menjadi dusta pemerintah bila mereka tidak menjalankan amanah konstitusi tersebut.

Akibat dari keterbukaan kontrol dan kinerja KPK yang sangat keras, kita terus disodori berbagai kasus korupsi di berbagai lini pemerintahan. Kalau dulu pada masa pemerintahan Suharto korupsi ditutup-tutupi, sekarang korupsi begitu sangat terbuka. Bahkan seolah-olah setiap hari kita disuguhkan beragam kasus korupsi. Korupsi telah mengjangkiti elit pemerintah dan swasta dari atas sampai ke bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, KPU, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan,

³⁸ Ibid., 144-149.

³⁹ Ibid., 152-153.

lembaga keagamaan, bahkan hingga lembaga-lembaga yang memiliki tugas melakukan pemberantasan korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan.⁴⁰ Fakta ini menjadi penegas betapa korupsi begitu sangat menggurita di negeri ini, sehingga tak heran bila kesejahteraan rakyat terkatung-katung tak jelas arahnya. Sebab pemerintah yang semestinya melakukan upaya penyejahteraan rakyat malah berdusta dengan memperkaya diri melalui korupsi.

Dalam data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2006, lembaga-lembaga vertikal seperti kepolisian, peradilan, pajak, imigrasi, beacukai, imigrasi, dan lain sebagainya dipersepsikan sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Sedangkan hasil IPK tahun 2007 yang diluncurkan *Transparency International*, koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 persen ketimbang tahun 2006 (skor 2,4). Dengan skor tersebut, Indonesia termasuk dalam daftar negara terkorup di dunia bersama 73 negara yang skornya di bawah 3.⁴¹

Sedangkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan dari akhir tahun 2006 sampai awal tahun 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp 14,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan proyek pemerintah. Selama lima tahun kebocoran pengadaan barang dan jasa mencapai lebih dari 30 %. Selain itu, masih banyak aset koruptor yang di luar negeri belum dikembalikan,⁴² sehingga negara mengalami kerugian yang luar biasa. Korupsi yang meyebar luas ke berbagai lini kehidupan benar-benar mengancam republik ini. Berbagai upaya yang selama ini dilakukan untuk menghukum koruptor tak juga membuahkan hasil maksimal. Tetapi kita tetap harus optimis, bahwa negara kita pasti bebas dari korupsi dengan semangat kebersamaan semua elemen bangsa.

Pada masa kepemimpinan SBY, penulis telah ikut berpartisipasi mengamati problem gurita korupsi. Meski tidak secara keseluruhan

⁴⁰ Moh. Masyhuri Ni'am dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih* (Jakarta: TK GNPK NU, 2006), 7.

⁴¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 5.

⁴² *Ibid.*, 5-6.

dapat penulis potret, tapi setidaknya penulis telah aktif menulis di berbagai media massa tentang problem korupsi pada masa ini. Misalnya tentang Korupsi Mantan Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Gayus terbukti melakukan gratifikasi dan pencucian uang senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.⁴³ Kasus ini pada saat itu menjadi kasus yang mengguncang jagat Indonesia, sebab pajak menjadi penghasilan utama negara. Ironisnya, penghasilan utama itu malah dikorupsi oleh pegawainya.

Pada masa kepemimpinan SBY juga, Kementerian Agama yang mestinya menjadi contoh berbagai Kementerian yang lain, malah banyak tersangkut kasus korupsi. Mulai korupsi dana Haji, pengadaan al-Qur'ân, hingga dana proyek pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah. Berdasar penelitian yang dikakukan KPK tahun 2012 dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kementerian Agama (Kemenag) menempati peringkat pertama instansi paling korup. Fakta ini tentu mengejutkan benak kita, tetapi bagaimanapun kita tidak bisa membantah hasil survei ini, karena survei ini tentu memiliki bukti konkret yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁴

Presiden PKS pun, Luthfi Hasan Ishaq (LHI) juga tersangkut kasus korupsi. Penetapan LHI membuat publik tercengang. Publik kembali geger memperbincangkan panggung politik kaitannya dengan agama di negeri ini. Selama ini PKS dikenal getol menyerukan antikorupsi. Tidak sedikit para politisi PKS yang bermanuver menyinggung perilaku korup elit partai politik yang lain. Terutama pada partai yang berideologi nasionalis. Maka menjadi wajar bila masyarakat gaduh ketika LHI ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor daging sapi. Karena politisi PKS sudah dinilai menyimpang dari garis perjuangannya yang berideologi Islam. Tentu tidak diajarkan dalam Islam berpolitik dengan cara korupsi. Sebagai agama, Islam mengajarkan konsep kejujuran dan keadilan dalam berpolitik. Tetapi nyatanya, itu semua hanya menjadi wacana dalam gerak parpol Islam,

⁴³ A. Wisnubrata (ed.), "Berkas Kasus Korupsi Gayus Lengkap", *Koran Online Kompas.com*, (6 Mei 2011).

⁴⁴ Masduri, "Koruptor Generasi Gayus", 5.

termasuk pada PKS sekalipun yang selama ini dikenal sebagai parpol yang sangat fanatik keislamannya.⁴⁵

LHI bersama rekannya, Ahmad Fathanah, terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi kurungan 1 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, Luthfi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.⁴⁶

Kasus korupsi yang melibatkan anak muda juga tidak sedikit. Telah banyak pemuda-pemuda yang diseret ke dalam tahanan, bahkan mereka adalah kader-kader muda dari partai yang sedang berkuasa pada waktu itu, yakni Demokrat. Mereka adalah Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng. Bahkan KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Anas adalah tokoh politik muda yang kariernya sangat cepat naik daun. Kariernya dalam dunia politik berawal dari kipranya di dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga kemudian Anas terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI pada kongres di Yogyakarta tahun 1997.⁴⁷

Anas akhirnya menyusul Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng mendekam dalam penjara. Ditetapkan Anas sebagai tersangka menambah daftar panjang pemuda yang tersangkut kasus korupsi. Pemuda yang digadang-gadang sebagai agen perubahan sekarang menjadi pelaku kejahatan kerah putih yang jelas-jelas merugikan rakyat. Dulu Anas adalah bagian dari mahasiswa 1998 yang menuntut pelengseran Suharto karena dinilai koruptif, sekarang dirinya juga harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena prilaku korupsi yang dilakukannya.

⁴⁵ Masduri, "Akil, Buku, dan Korupsi", *Radar Surabaya*, (23 Oktober 2013), 7.

⁴⁶ Dian Maharani, "Luthfi Hasan Ishaq Divonis 16 Tahun Penjara", *Koran Online Kompas.com*, (9 Desember 2013).

⁴⁷ Masduri, "Pemuda dalam Pusaran Korupsi", *Tribun Timur*, (7 Maret 2013), 13.

Peristiwa ini seperti senjata makan tuan, sekaligus otokritik kepada para pemuda agar menjalankan amanahnya dengan baik, karena rakyat sedang menunggu kontribusi besar para pemuda, dalam mengawal kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.⁴⁸

Pada akhir kepemimpinan SBY ini, kita kembali disuguhi drama korupsi yang menyayat hati. Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Kasus ini sungguh memukul hati rakyat. Di tengah harapan besar tentang peran pemerintah dalam upaya penyelenggaraan haji yang bersih, malah Menteri Agamanya yang melakukan korupsi haji. Sangat tidak etis, Kemenag mestinya menjadi contoh yang baik dari beberapa instansi negara lainnya. Tetapi Kemenag yang diharapkan menjadi instansi paling bersih malah sebaliknya. Fakta ini menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia masih jauh dari nilai-nilai esensial yang diajarkan dalam agama.⁴⁹

Beberapa catatan tentang korupsi pada masa kepemimpinan SBY ini merupakan catatan penulis sendiri, meski tidak tuntas, namun uraian beberapa kasus ini penulis kira cukup mewakili gambaran korupsi pada masa kepemimpinan SBY. Meski banyak pejabat pemerintah di lingkungan SBY yang tersangkut korupsi, SBY tetap tegar dan selalu mendengungkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Semoga sikap perang terhadap korupsi yang dimiliki oleh SBY ini senantiasa terus dipegang sampai akhir jabatannya.

Kontekstualisasi Rekonstruksi Teologi Hasan Hanafi

Rekonstruksi teologi Hasan Hanafi merupakan langkah konkret yang dilakukannya dalam upaya menemukan revelansi teologi Islam terhadap persoalan umat Islam dewasa ini. Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh berbagai bangsa di belahan dunia, secara khusus Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, adalah persoalan korupsi. Korupsi di Indonesia telah berada pada titik nadir sehingga sangat membahayakan keberlangsungan bangsa ini ke

⁴⁸ Ibid., 13.

⁴⁹ Icha Rastika, "KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka", *Koran Online Kompas.com*, (22 Mei 2014).

depan. Islam sebagai agama yang penganutnya terbesar di republik ini tentu harus mengambil langkah konkret agar negara ini bisa terselamatkan dari persoalan korupsi.

Kita tentu sangat malu sebagai bangsa yang besar, tapi juga memelihara koruptor yang keberadaannya sangat membahayakan masa depan bangsa dan negara. Lebih dari itu, sebagai umat Islam tentu kita juga malu kepada dunia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada umat Islam di dunia, bahwa Islam adalah agama yang sangat menolak keras tindakan pengorupsian uang negara. Suap, pencurian, dan berbagai modus upaya memperkaya diri dengan cara-cara tidak benar, merupakan rangkaian dari perilaku korupsi yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Islam adalah agama *rahmah li al-'alamîn* yang menghendaki kehadirannya ke dunia sebagai penebar kebaikan dan kesejahteraan hidup.

Indonesia dengan penganut agama Islam terbesar di dunia harus muncul sebagai mercusuar dunia Islam yang patut menjadi teladan. Karenanya, kepemimpinan yang ada di dalamnya harus berdasar pada spirit nilai-nilai dalam Islam. Islam sebagai sebuah agama menjadikan teologi sebagai dasar keyakinan. Teologi menjadi tonggak kebangkitan umat Islam. Sebab melalui teologi kita berkeyakinan tentang kebenaran Tuhan dalam Islam. Sebab itulah, jika mengimpikan kemajuan dalam Islam menurut Ḥasan Ḥanafî kita perlu membaca ulang kembali bangunan teologi Islam.

Ḥasan Ḥanafî menekankan bahwa teologi harus mampu menjawab tantangan kemanusiaan. Sebab sumber kebahagiaan dalam keyakinan teologis berada pada Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Karenannya manusia menggantungkan hidup kepadaNya. Sebagai sumber pengharapan, Tuhan harus dihadirkan secara praksis dalam kehidupan nyata sebagai gambaran nyata dari keberadaanNya serta keyakinan teologis tentang diriNya. Manusia beragama harus tampil menyejukkan, menebarkan damai, dan kemajuan bagi kehidupan.

Sebab itulah, menghadapi problem besar kebangsaan kita, yakni korupsi, penulis ingin melakukan kontekstualisasi pemikiran rekonstruksi teologi Ḥasan Ḥanafî terhadap problem korupsi di Indonesia. Semua ini sebagai langkah untuk menjadikan nilai-nilai

Islam sebagai pijakan hidup kepemimpinan di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa teologi merupakan bangunan dasar agama Islam, maka dirasa penting dilakukan kontekstualisasi rekonstruksi teologi Hasan Hanafi, sebagai sebuah pemikiran progresif yang memang harus benar-benar membumi menjadi pijakan bersama umat Islam. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita kelahiran Islam sebagai agama *rahmah li al-'alamin* yang mengandaikan sebuah kehidupan manusia yang berdasarkan keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bersama.

Hasan Hanafi memandang teologi sebagai kerja emosional yang di dalamnya seseorang menyatukan segala kekuatan dan kemampuannya menuju hakikat yang satu, mutlak, menyeluruh dan suci. Kemudian melakukan transformasi sosial sehingga keyakinan teologis dalam Islam bisa hadir secara praksis dalam tindakan nyata.⁵⁰ Bila dikaitkan dengan spirit Teologi Antikorupsi, pandangan Hanafi hendak mendeskripsikan bahwa orang yang percaya pada kebenaran Tuhan sejatinya harus menjadikan ajaran agamanya sebagai jalan hidup yang harus direalisasikan dalam kesehariannya.

Tuhan adalah gambaran tentang kesempurnaan. Harusnya menjadikan manusia yang meyakini kebenarannya, bergerak ke arah kesempurnaan sebagaimana dicontohkan Tuhan melalui sifat-sifatnya yang agung. Bagi Hasan Hanafi, percaya kepada Tuhan sebagai Zat Pencipta, tidak cukup hanya dalam hati, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam tindakan nyata.⁵¹ Sebab itulah menjadi kontradiktif, di tengah ritual keagamaan yang sangat banyak di Indonesia, namun mengapa masih saja banyak perilaku korupsi di berbagai lini kehidupan? Apakah ini menjadi penanda bahwa ada problem konsep keyakinan teologis dalam umat Islam Indonesia?

Selama ini banyak orang menggantungkan hidup yang mendamaikan pada agama, karena agama diyakini sebagai sumbu spirit hidup. Namun mengapa masih banyak perbuatan destruktif yang dilakukan oleh umat beragama? Fakta ini menjadi penanda bahwa keyakinan teologis masih belum mampu mendorong penganut agama Islam di Indonesia secara sinergis bertindak ideal seperti dalam ajaran

⁵⁰ Hanafi, *Dari Akidah ke Revolusi*, 15.

⁵¹ Hanafi, "Ideologi dan Pembangunan", 53-63.

agama. Hal ini lahir tentu karena ada problem teologis yang tidak didasarkan pada kesadaran murni dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga berimplikasi pada lahirnya *split personality* antara keimanan teoretik dan keimanan praksis dalam kehidupan umat Islam. Pada gilirannya hal ini mendorong lahirnya morak ganda atau sinkretisme keperibadian.⁵²

Berbagai tindakan destruktif yang hadir dalam kehidupan manusia tak lain merupakan implikasi dari lemahnya keyakinan teologis, bahkan bisa pula karena kesalahan dalam memahami Tuhan. Keyakinan teologis yang benar pasti akan menjadi penggerak ke arah kehidupan yang lebih bermartabat. Melalui keyakinan teologis yang benar. Manusia akan menjadi sadar makna dari kelahirannya. Tugas kekhalifahan telah diamanatkan Tuhan sejak awal pertama penciptaan manusia. Manusia yang percaya Tuhan pasti sadar tugas tersebut. Sebab kehidupan adalah tanggung jawab bersama. Jika kita mengandaikan kebaikan hidup, maka secara bersama-sama kita harus melakukan tindakan konstruktif seperti telah diajarkan dalam Islam.

Maka karena itulah, teologi harus dibangun atas dasar kemanusiaan. Teologi tidak boleh melangit, tapi harus menyentuh ke bumi sebagai landasan hidup yang menggerakkan. Bagi Ḥanafī ungkapan tentang sifat-sifat Tuhan yang Maha Sempurna dan Maha Mutlak yang seringkali terlontar oleh para agamawan, tidak penting lagi diungkapkan. Sebab Tuhan tanpa penyucian manusia, tetap Tuhan Maha Sempurna dan Mutlak. Penggambaran Tuhan yang demikian, membuat kita sangat sulit mendekati Tuhan, bahkan pada tataran tertentu membingungkan akal manusia, serta melemahkan imajinasi tentang kehidupan.⁵³ Sebab manusia itu terbatas, sementara bangunan teologis itu seperti mengawang, bukan berarti kita tak percaya pada Keangungan Tuhan, tetapi keyakinan itu harus diarahkan pada upaya agar manusia tergerakkan melakukan sesuatu yang konstruktif. Tuhan tanpa diangungkan dan disucikan tetap Maha Agung dan Suci, karena Tuhan adalah segalanya. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah nasib manusia. Beragam persoalan kemiskinan, penjajahan, diskriminasi,

⁵² A. Khudori Soleh, *Filsafat Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 64.

⁵³ Ḥanafī, *Dari Akidah ke Revolusi*, xxviii.

ketidakadilan, dan lain sebagainya merupakan tugas hidup yang harus diselesaikan.

Karena itulah, agama sebagai jalan hidup yang dipercaya mampu melahirkan pencerahan penting mengambil peran aktif—melalui para ulamanya—melakukan tafsir terhadap bangunan teologinya guna mendapatkan manfaat yang maksimal dalam menggarap hidup yang lebih bermartabat. Bagi Ḥanafī konsep tentang Dzat dan Sifat-Sifat Tuhan sebenarnya tidak merujuk pada kesucian Tuhan. Tuhan tanpa disucikan manusia tetaplah Dzat Yang Maha Suci. Semua deskripsi tentang sifat kesempurnaan Tuhan dalam al-Qur’ān dan Ḥadīth sesungguhnya untuk mengarahkan manusia agar mampu menjadi manusia yang ideal dengan mengimplementasikan gambaran ideal tentang kesempurnaan Tuhan tersebut.⁵⁴

Dari padangan ini jelas, Ḥasan Ḥanafī berusaha keras mengarahkan teologi pada kebaikan hidup bersama melalui gagasan rekonstruksi dari Teosentris ke Antroposentris. Lebih jauh berikut beberapa gagasan Ḥasan Ḥanafī yang secara nyata diarahkan pada upaya mewujudkan gagasan teologi yang membumi, sebagai bentuk konkret dari komitmen keyakinan pada adanya Tuhan yang Maha segalanya dalam hidup. Ḥanafī benar-benar konsisten mengandaikan teologi sebagai basis kehidupan yang mendasar. Karena teologi adalah proyeksi manusia tentang hidupnya.

Sebab itu Ḥasan Ḥanafī berusaha mengubah term-term keagamaan dari yang spiritual dan sakral menjadi sekadar material, dari yang teologis menjadi antroposentris. Ḥanafī melakukan ini dalam rangka untuk mengalihkan perhatian dan pandangan umat Islam yang cenderung metafisik menuju sikap yang lebih berorientasi pada realitas empirik.⁵⁵ Selama ini realitas umat Islam jauh dari harapan ideal, sebab teologi tak lagi mampu menggerakkan umat Islam agar mereka bergerak progresif. Pada posisi ini Ḥasan Ḥanafī merekonstruksi pemikiran teologi Islam, guna mengarahkan sepenuhnya pada kepentingan kemanusiaan.

⁵⁴ A. Khudari, *Filsafat Islam*, 77.

⁵⁵ *Ibid.*, 78.

Ḥasan Ḥanafī selama sejak muda sudah ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial guna mengupayakan kesejahteraan dan keamanan rakyat Mesir. Dalam perjalanannya itu, Ḥanafī melihat bahwa ada problem keagamaan yang berpengaruh pada pola pikir umat Islam di Mesir waktu itu. Apa problem itu? Bagi Ḥanafī problemnya terletak pada banguna konsep teologi klasik yang tidak membumi. Teologi Islam klasik hanya fokus pada Tuhan, dan melupakan manusia sebagai objek dari ajaran Tuhan.

Implikasi dari konsep teologi yang demikian itu, akan melahirkan konsep-konsep penguasa. Mula-mula Tuhan diyakini sebagai penguasa tunggal, yang memiliki otoritas penuh yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi karena Tuhan tidak secara konkret ada dalam kehidupan manusia, mulailah muncul penguasa-penguasa baru dalam beragam bentuknya, seperti pemerintah atau presiden dalam ranah politik. Dalam peranannya, seorang penguasa biasanya merasa berkuasa penuh, sehingga cenderung otoriter. Akibatnya kekuasaan yang dibangun menjadi absolut, tidak seorang pun yang berani menentang kekuasaannya, serta semua menjadi tunduk atas kendalinya.⁵⁶

Akibat pola keyakinan teologis yang berimplikasi pada realitas sosial-politik, maka bangunan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa menjadi rusak. Sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kekuasaan sering terjadi. Secara khusus pada konteks ini adalah praktik korupsi. Korupsi menjadi kejahatan yang sangat sering terjadi dalam kekuasaan politik, sebab hasil korupsi berupa kebijakan atau uang biasanya mudah melanggengkan kekuasaannya,⁵⁷ sehingga masyarakat menjadi tunduk layaknya ketundukan manusia pada Tuhan dalam gagasan teologis yang selama ini disalahpahami oleh sebagian umat Islam.

⁵⁶ Hanafi, *Dari Akidah ke Revolusi*, xxix. Baca juga Hassan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, terj. Khoiron Nahdiyin (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003), 4-5. Dalam tulisan tersebut Ḥasan Ḥanafī melakukan kritik habis-habisan terhadap bangunan teologi klasik, terutama Ash'ariyah. Ḥasan Ḥanafī melihat teologi klasik tidak mampu membaca persoalan riil kemanusiaan yang dihadapi umat Islam, sehingga teologi sebagai jalan pembebasan tidak dapat terealisasi.

⁵⁷ Pengantar Redaksi, dalam Hassan Ḥanafī, *Islamologi 3: dari Teosentrisme ke Antroposentrisme*, terj. Maftuh Faqih (Yogyakarta: LKiS, 2011), v-vi.

Secara praksis, pemilik kekuasaan cenderung berperilaku korupsi karena ia berkeyakinan punya otoritas penuh. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bangsa dan negara sering terjadi. Bangunan keyakinan teologis yang melangit akibat pengangungan pada Tuhan yang disalahpahami berimplikasi pada realitas sosial dan politik. Sebab itulah, Hasan Hanafi melalui gagasan rekonstruksi teologinya, hendak mengajak umat Islam mengubah term-term keagamaan yang melangit menuju ke bumi. Sesuatu yang dalam teologi klasik kurang diperhatikan, sehingga persoalan kemanusiaan menjadi masalah yang tak menemukan jawaban secara konkret dalam teologi Islam.⁵⁸ Maka Hanafi hendak melakukan revolusi akidah, menuju kehidupan umat Islam yang berkeadaban.

Banyak gagasan rekonstruksi teologi yang selama ini sering dilakukan oleh Hasan Hanafi, seperti rekonstruksi ulang terhadap pemaknaan enam sifat Tuhan, yakni *Wujūd*, *Qidam*, *Baqâ'*, *Mukhâlafatuh li al-Hawâdithi*, *Qiyâmuh bi nafsih*, dan *Wahdânîyah*. Pandangan Hanafi terkait sifat tersebut jika dikontekstualisasikan dengan problem korupsi yang melanda bangsa ini sangat relevan.

Sifat dasar dari Tuhan dalam agama Islam adalah wujud. Wujud merupakan representasi dari ke-ada-annya sebagai Dzat Yang Maha Segalanya. Dia pencipta segala yang ada di alam semesta ini. Keberadaan Tuhan tak ada awal dan akhir. Untuk memahami ini memang sulit, karena sebenarnya bahasa awal dan akhir ada setelah Tuhan menciptakan sesuatu, sehingga ada istilah lama dan baru, yang pada bagian berikutnya akan dibahas. Jadi jika kemudian ditanya soal proses keberadaan Tuhan, jawabannya Tuhan itu ada tanpa bisa dianalisa melalui logika pengetahuan. Karena keberadaan Tuhan itu abadi tanpa awal dan akhir. Tuhan berdiri sendiri. Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan manusia. Sebab Dia pencipta segalanya.

⁵⁸ Term-term kemanusiaan dalam wacana teologi klasi kurang mendapat perhatian, karena teolog masa itu lebih menekankan pandangannya pada persoalan-persoalan ketuhanan yang melangit, sementara gagasan kemanusiaan kurang menjadi perhatian, karena itu gagasan kemanusiaan penting diperhatikan oleh teolog Islam, sebagai sebuah gerakan menuju perubahan yang bermartabat. Baca dalam *Ibid.*, 65-67.

Maka karenanya, dalam analisis Ḥanafī, *Wujūd* Tuhan sejatinya tidak menjelaskan *Wujūd* Tuhan dalam makna “keberadaan”, karena sejatinya Tuhan tidak memerlukan pengakuan. Tanpa manusia, Tuhan tetap *Wujūd*. Sebab itu *Wujūd* Tuhan berarti *tajribah wujūdiyyah* pada manusia, tuntutan pada umat manusia untuk mampu menunjukkan eksistensi dirinya.⁵⁹ Urgensi dari kemampuan menunjukkan eksistensi diri sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar ada. Bila dikontekstualisir dengan konsep kepemimpinan dalam sebuah negara, eksistensi diri merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir pada rakyat dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.

Eksistensi sebuah pemerintahan akan terlihat dan kehadirannya benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat, bila pemerintah hadir secara langsung melalui berbagai kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan yang pro-rakyat tentu bisa lahir melalui pemerintahan yang bersih, jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tidak mungkin kepemimpinan yang penuh dengan korupsi akan hadir membawa perubahan kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyat. Dengan demikian, melalui tafsir Ḥasan Ḥanafī terhadap sifat *Wujūd*, kita bisa belajar bahwa kepemimpinan itu harus menunjukkan eksistensi dirinya sebagai pemimpin yang benar-benar hadir membawa perubahan bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kemampuan menunjukkan eksistensi ini sangat penting, karena dasar dari segalanya dalam hidup ini adalah keberadaan. Jika tak “ada”, atau jika tak bereksistensi, sejatinya kita tiada. Begitupun dengan kepemimpinan, jika pemerintah tak bisa hadir dalam kehidupan masyarakat, eksistensinya tidak akan terbaca. Melalui bangunan rekonstruksi teologis ala Ḥasan Ḥanafī ini, kita bisa memantapkan keyakinan teologis pada Tuhan dengan langkah konkret. Artinya, percaya kepada Tuhan tidak hanya berada dalam angan-angan dan hati, tapi bisa disaksikan langsung dalam realitas sosial-kemasyarakatan, sebagai langkah kemajuan bersama atas keyakinan teologis yang dibangun atas dasar semangat kemanusiaan. Agama hadir untuk membawa perubahan ke arah kemajuan yang dinamis.

⁵⁹ A. Khudori, *Filsafat Islam*, 78.

Setelah wujud atau eksistensi kepemimpinan terlihat dengan hadirnya pemerintahan yang pro terhadap rakyat. Sifat Tuhan yang kedua, *Qidam* (dahulu) menjadi menarik dikontekstualisasikan bagi upaya pemberantasan korupsi. *Qidam* yang dalam pandangan Hasan Hanafi berarti pengalaman kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. *Qidam* adalah modal pengalaman dan pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas masa lalu dan masa depan, sehingga tidak akan lagi terjatuh dalam kesesatan, taqlid dan kesalahan.⁶⁰ Berarti bahwa kepemimpinan itu harus menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Dalam setiap kepemimpinan yang telah berjalan, harus selalu ada evaluasi agar kepemimpinan yang dijalankannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan segala aspek ideal dalam kepemimpinan.

Secara khusus dalam praktik korupsi di Indonesia, dalam sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia tidak ada satu pun pemerintahan yang bisa bebas dari korupsi. Sekarang di era kebebasan berpendapat, korupsi semakin menjamur sebab media sangat bebas memberitakan siapapun yang terjangkit korupsi. Berbeda dengan masa Orde Baru, berita korupsi ditutup rapat-rapat karena ada ancaman dari rezim Orde Baru bagi media yang tidak memihak rezim. Karenanya, konteks dari bangunan teologis sifat *Qidam* terhadap semangat antikorupsi adalah upaya pemerintah untuk belajar dari masa lalu, bahwa korupsi itu merugikan rakyat dan hanya akan membuat petaka dalam hidupnya.

Dengan demikian, melalui semangat pembelajaran terhadap sifat *Qidam* pemerintah bisa terus berbenah untuk melihat masa depan Indonesia agar lebih cerah. Karena kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang visioner dengan terus melakukan pembenahan melalui pembelajaran dari masa lalu. Telah banyak pelajaran berharga dari masa lalu, tertangkapnya elit-elit politik dan pemerintahan di negeri ini, seperti mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mantan Menteri Pemuda dan

⁶⁰ Ibid., 78.

Olahraga, Andi Mallarangeng, dan Menteri Agama, Suryadharma Ali, sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah sangat jelas menjadi tamparan moral sekaligus pembelajaran bagi elit pemerintah untuk terus melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat.

Setelah *Wujūd* dan *Qidam*, kita bisa menganalisis konteks dari sifat *Baqâ'* yang berarti kekal dalam upaya menumbuhkembangkan semangat antikorupsi di Indonesia. Bagi Ḥanafî, *Baqâ'* berarti pengalaman kemanusiaan yang muncul dari lawan sifat *fanâ'*. Dengan demikian, bagi Ḥanafî *Baqâ'* berarti tuntutan pada manusia untuk membuat dirinya tidak cepat rusak atau fana, yang itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak melakukan hal-hal yang konstruktif; dalam perbuatan maupun pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mempercepat kerusakan di bumi.⁶¹ Pada konteks terhadap problem korupsi, jelas bahwa pandangan Ḥanafî ini menekankan bahwa umat Islam melalui sifat *Baqâ'* Tuhan sejatinya dituntut untuk menjauhi tindakan destruktif, secara khusus dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

Sifat *Baqâ'* pada konteks ini menekankan semangat antikorupsi, sebab lawan dari sifat *Baqâ'* adalah *fanâ'* yang berarti rusak. Betapa sering kita dihadapkan dengan berabagi kasus korupsi elit-elit penting yang selama ini begitu dihormati, namun runtuh begitu saja kepercayaan kepada mereka karena kasus korupsi yang dilakukannya. Sebagai contoh dalam hal, Menteri Agama Suryadharma Ali, dahulu ia merupakan tokoh yang sangat dihormati karena berada pada posisi penting dalam pemerintahan di negeri ini sebagai orang yang dipercaya mengurus urusan keagamaan di republik ini, namun penghormatan terhadap dirinya hilang begitu saja saat ia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus haji di kementeriannya.

Rusaknya kehormatan seorang Suryadharma Ali, jelas karena dirinya melakukan tindakan destruktif berupa korupsi. Sedangkan Tuhan jelas-jelas melalui tafsir Ḥasan Ḥanafî terhadap sifat *baqâ'* menekankan pentingnya menjaga keabadian diri melalui berbagai

⁶¹ Ibid., 78-79.

tindakan konstruktif. Seorang manusia dituntut berbuat konstruktif dalam semua hal, bukan hanya perbuatan, tapi juga dalam pemikiran dan sikapnya. Pada sifat ini, jelas nampak sekali semangat antikorupsi yang dibangun oleh Hasan Hanafi. Tindakan korupsi jelas merupakan tindakan destruktif yang harus dihindari oleh semua pemimpin. Jika dirinya masih memaksa berbuat destruktif, maka tunggulah kehancuran dirinya.

Sifat berikutnya adalah *Mukhâlafatuh li al-Hawâdith* (berbeda dengan yang lain), yang akan semakin menguatkan konteks sifat *Wujûd*, *Qidam*, dan *Baqâ'* terhadap semangat antikorupsi di Indonesia. Sebab *Mukhâlafatuh li al-Hawâdith*, dalam pandangan Hasan Hanafi berarti tuntutan agar manusia menunjukkan eksistensinya secara berbeda dengan orang lain. Bila dikaitkan dengan kepemimpinan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berkarakter. Kepemimpinan yang berkarakter adalah kepemimpinan yang lahir atas inisiasi sendiri untuk tampil beda dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, kepemimpinan yang berkarakter ini tentu sudah mapan dalam menebarkan semangat antikorupsi. Hal yang harus dilakukan adalah terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk selalu melakukan inovasi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara.

Bisa pula *Mukhâlafatuh li al-Hawâdith* dimaknai sebagai langkah untuk tampil beda dengan kepemimpinan yang selama ini banyak berkembang di pemerintahan. Misalnya, tak bisa kita pungkiri bahwa sistem pemerintahan yang selama ini ada di Indonesia sudah akut dengan budaya korupsi. Pada konteks ini, *Mukhâlafatuh li al-Hawâdith* bisa dimaknai sebagai semangat dari seorang pemimpin untuk tampil beda, jika budaya birokrasi yang selama ini ada penuh dengan kebiasaan korupsi, pemimpin ini hadir dengan semangat antikorupsi, sebagai antitesa, atau semangat berbeda dari kebiasaan yang selama ini ada dalam sebuah kepemimpinan. Seperti bahasa Lord Acton, bahwa *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung

korupsi absolut).⁶² Karenanya, kepemimpinan yang mengamalkan spirit nilai *Mukhâlafatuh li al-Ḥawâdith* akan selalu melakukan perlawanan terhadap kebiasaan-kebiasan buruk. Ia akan mencoba melawan kecenderungan bahwa kekuasaan itu sangat dekat dengan korupsi.

Kemampuan seorang pemimpin, akan terlihat bila ia mampu menunjukkan dirinya bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin harus berani mengambil resiko demi kepentingan rakyat dan negara. Pemimpin tidak boleh lemah, spirit dari *Mukhâlafatuh li al-Ḥawâdith* adalah spirit perlawan terhadap kejahatan kepemimpinan. Berani berbeda dalam *Mukhâlafatuh li al-Ḥawâdith*, harus dimaknai konstruktif. Artinya arah kepemimpinan yang dijalankan harus mampu melawan kezaliman terhadap rakyat. Tidak boleh mengikuti ketersesatan korupsi yang selama ini menjamur dalam kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pemimpin yang hadir dengan semangat *Mukhâlafatuh li al-Ḥawâdith* harus membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik.

Sedangkan sifat *Qiyâmuh bi nafsih* (berdiri sendiri), menjadi kekuatan besar bagi seseorang ataupun seorang pemimpin, karena dalam pandangan Ḥasan Ḥanafî, sifat *Qiyâmuh bi nafsih* bermakna tuntunan agar umat manusia mampu menunjukkan eksistensinya secara mandiri, tidak mengekor atau taqlid pada pemikiran dan budaya orang lain. *Qiyâmuh bi nafsih* adalah deskripsi tentang titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah tujuan akhir, sesuai dengan segala potensi dan kemampuan diri.⁶³

Pada konteks ini, kita bisa memahami bahwa spirit *Qiyâmuh bi nafsih* adalah kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner mensyaratkan kemandirian. Maka dalam hal ini, butuh seorang pemimpin yang kuat, yang benar-benar ingin mengabdikan kepada bangsa dan bernegara, bukan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sebab itulah, pemimpin itu harus punya kemandirian secara finansial, tidak

⁶² Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

⁶³ A. Khudari, *Filsafat Islam*, 79.

menggantungkan hidupnya pada negara, sehingga mereka menghindari tindak pidana korupsi.

Selama ini banyak pemimpin yang tersangkut kasus korupsi, karena dirinya tidak mandiri secara finansial. Untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai, seperti Anas Urbaningrum, melakukan kongkalikong untuk bisa mendapatkan dana kampanye sehingga saat terpilih tidak punya kebijakan yang pro-rakyat karena tersandera pemberi uang. Contoh yang paling nyata dalam hal ini, adalah anggota dewan ataupun bupati dan gubernur yang menerima bantuan dana kampanye dari perusahaan ataupun perseorangan. Mereka sering tersandera dalam mengambil kebijakan, karena memiliki hutang budi pada saat pemilihan umum. Akibatnya rakyat menjadi korban.

Dengan demikian, jelas bahwa kemandirian finansial memiliki pengaruh yang besar terhadap kemandirian seorang pemimpin. Banyak kebijakan yang tidak pro-rakyat lahir karena banyaknya *kongkalikong* elit partai saat pemilihan umum. Sementara dalam Islam melalui spirit *Qiyâmuh bi nafsih* kita diajarkan kemandirian dalam kepemimpinan, sehingga mampu melahirkan kebijakan yang pro-rakyat.

Sebab lebih dari itu, *Qiyâmuh bi nafsih* bagi Hasan Hanafi bermakna sebagai titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah tujuan akhir, sesuai dengan segala potensi dan kemampuan diri. Artinya pada konteks kepemimpinan, hal ini berarti tuntutan agar pemimpin negara punya visi dan rencana yang jelas, sehingga arah masa depan sebuah bangsa dan negara tidak mengawang.

Bagian terakhir dari tafsir Hasan Hanafi terhadap enam sifat Tuhan adalah sifat *Waḥdâniyah* (keesaan). Hasan Hanafi dalam sifat ini benar-benar membuka kesadaran penuh seorang Muslim, agar memaknai keyakinan teologisnya sebagai gagasan ideal menuju kesempurnaan hidup. Bagi Hasan Hanafi *Waḥdâniyah* tidak merujuk pada keesaan Tuhan, pensucian Tuhan dari kegandaan (*shirk*) yang diarahkan pada faham trinitas maupun politeisme, tetapi lebih mengarah eksperimentasi kemanusiaan. *Waḥdâniyah* adalah pengalaman umum kemanusiaan tentang kesatuan; kesatuan tujuan,

kesatuan kelas, kesatuan nasib, kesatuan tanah air, kesatuan kebudayaan dan kesatuan kemanusiaan.⁶⁴

Pada konteks kepemimpinan, pemaknaan Ḥasan Ḥanafī terhadap *Waḥdānīyah* ini semacam ruh yang harus selalu hadir dalam nafas tindakannya. Kepemimpinan yang ideal itu harus menghadirkan persamaan nasib yang nanti akan mendorong orang bersangkutan memiliki gaya kepemimpinan yang pro-rakyat. Praktik korupsi yang selama ini berkembang dalam pemerintahan di Indonesia lahir karena pemimpin kita tidak memiliki rasa persamaan nasib sebagai bangsa yang satu, sehingga mereka lupa nasib rakyat miskin yang terlunta-lunta di bawah. Akibat kealpaan itulah praktik korupsi menjadi menjamur dari tingkat bawah sampai elit di pusat.

Menjadi penting bagi kita sebagai umat Islam membaca pemaknaan Ḥasan Ḥanafī terhadap sifat *Waḥdānīyah*, sebagai sebuah mimpi tentang kehidupan kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan persamaan hak untuk hidup sama-sama hidup sejahtera. Sehingga dalam hal ini, pemimpin sebagai pemegang kebijakan di Republik Indonesia benar-benar mengarahkan kebijakannya untuk kebaikan hidup bersama. Tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan. Semua rakyat bisa hidup sejahtera dan mampu berpartisipasi secara bersama-sama dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makur.

Pada tahap berikutnya, jika dicermati secara mendalam Ḥasan Ḥanafī melalui penafsiran term kalam yang serba materi dan mendunia, maka apa yang dimaksud dengan istilah tauhid atau teologi dalam pemikiran Ḥanafī bukan konsep yang menegaskan tentang keesaan Tuhan yang diarahkan pada faham trinitas maupun politheisme, tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang jauh dari perilaku dualistik seperti hipokrit, kemunafikan, dan oportunistik.⁶⁵ Pada konteks ini, semangat antikorupsi kembali menemukan relevansinya, bahwa kepemimpinan itu harus dihadirkan dengan sifat kejujuran, penuh tanggung jawab, adil, serta menjauhi sifat

⁶⁴ Ibid., 79.

⁶⁵ Ibid., 79-80.

kemunafikan dan oportunistik yang hanya akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama ini pemimpin yang bertindak koruptif, mereka telah munafik kepada diri mereka sendiri dan rakyatnya. Pada awal kampanye mereka menjanjikan banyak kesejahteraan dan akan berkomitmen pada pemberantasan korupsi, namun jadinya mereka malah terperangkap dalam lubang korupsi. Mereka melupakan janjinya, sementara janji itu merupakan tanggung jawab harus direalisasikan. Pemimpin itu harus bertindak selaras antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Begitulah sebenarnya konteks dari pandangan Hasan Hanafi tentang sifat *Wahdānīyah* terhadap problem korupsi. Orang yang melakukan tindakan korupsi sejatinya telah berwajah dua, mereka itu munafik. Sementara Tuhan selalu mengajarkan manusia untuk jujur dan menjauhi kemunafikan.

Dengan demikian, Hasan Hanafi telah melakukan relovusi besar-besaran dalam bidang teologi, sebagai proyeksi keinginan kemanusiaan untuk membumikan ajaran-ajaran Islam, sehingga mampu menyelesaikan problem keterbelakangan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, otoritarianisme, dan segenap problem kemanusiaan yang belakangan ini mengguncang jagat kehidupan umat Islam. Salah satu lahirnya problem kemanusiaan itu akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan elit penguasa, seperti kasus korupsi yang selama ini banyak berkembang di negara-negara Islam, secara khusus Indonesia. Akibatnya kemiskinan dan penderitaan rakyat semakin parah. Bahkan hal ini pun lahir karena kesalahan rakyat dalam memahami akidah Islam,⁶⁶ yang mestinya menggerakkan kesadaran umat Islam menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Sehingga keadaban hidup dapat terealisasi sebagai tugas kemanusiaan yang sejak awal dicitakan oleh Tuhan sebagai *khalifah fi al-ard*. Lebih dari itu, keyakinan teologis mestinya menghadirkan penguasa atau pemerintahan yang mampu mengimplementasikan spirit dasar teologi sebagai kesadaran yang menggerakkan umat Islam menuju umat yang berkeadaban.

⁶⁶ Hanafi, *Dari Akidah ke Revolusi.*, viiv.

Catatan Akhir

Melalui kesadaran teologi yang menggerakkan, bangunan teologi antikorupsi melalui spirit nilai yang digagas oleh Ḥasan Ḥanafī kita akan menemukan era baru kebangkitan teologi dalam Islam. Teologi yang dalam bahasa Ḥanafī disebut sebagai proyeksi hidup harus lahir ke dalam ranah konkret kehidupan umat manusia. Teologi yang tak bisa diwujudkan secara konkret, merupakan bentuk kelemahan iman seseorang. Tulisan kontekstualisasi teologi Ḥanafī terhadap problem korupsi di Indonesia hadir sebagai refleksi bersama, menatap masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, beradab, dan berkeadilan, sebagaimana cita-cita kebangsaan kita bersama.

Kehadiran teologi antikorupsi menjadi mendesak di tengah hingar-bingar semakin banyaknya elit pemerintah berlatar belakang aktivis organisasi keagamaan. Semua ini semakin memperjelas betapa ajaran agama Islam belum mampu menggerakkan kesadaran bersama tentang hidup yang ideal. Sementara kehadiran Islam sebagai rahmat bagi semesta, mengharuskan tindakan ideal setiap umat Islam, agar kehadiran Islam benar-benar menyejukkan, memajukan, dan menyejahterakan kehidupan bersama.

Berbagai uraian kontekstualisasi dari pemikiran teologi Ḥasan Ḥanafī terhadap problem korupsi, telah jelas bahwa teologi harus hadir sebagai pembebasan bagi manusia dari segenap peristiwa hidup yang di deritanya. Problem korupsi adalah problem akut kemanusiaan yang sedang hangat di negara kita. Maka gagasan rekonstruksi teologi Ḥanafī sangat relevan dijadikan sebagai semangat nilai untuk membangun Teologi Antikorupsi. Urgensi bangun teologi antikorupsi, merupakan wujud dari mimpi bersama tentang Indonesia yang maju dan sejahtera. Lebih dari itu, sebagai komitmen bersama umat Islam untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam benar-benar merupakan rahmat bagi semesta alam, yang menggerakkan setiap pemeluknya benar-benar mampu melaksanakan *amar ma'rūf nahy munkar*.

Daftar Rujukan

Alatas, Sayyid Husein. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3S, 1987.

- Albab, Ulul. *A to Z Korupsi: Menumbuhkembangkan Semangat Antikorupsi*. Surabaya: Jaringan Pena, 2009.
- Djaja, Ermansjah. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ensiklopedia Bahasa Inggris. "Hassan Hanafi" dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Hanafi, diakses pada tanggal 9 Mei 2014.
- Faisol, M. "Menyikapi Tradisi: Membaca Proyek Pemikiran Kiri Islam" dalam Wasid (ed.), *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas: Ide-ide Pembaharuan dalam Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2011.
- Hambali, M. Ridwan. "Hassan Hanafi: Dari Kiri Islam, Revitalisasi, hingga Oksidentalisme" dalam M. Aunul Abied Shah (et. al.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hanafi, Hassan. "Ideologi dan Pembangunan" dalam Shonhaji Soleh (ed.), *Agama, Ideologi, Pembangunan*. Jakarta: P3M, 1991.
- *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- *Dari Akidah ke Revolusi: Sikap Kita terhadap Tradisi Lama*, terj. Asep Usman Ismail. Jakarta: Paramadina: 2003.
- *Islamologi 3: dari Teosentrisme ke Antroposentrisme*, terj. Maftuh Faqih. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- *Oposisi Pasca Tradisi*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ja'far, Suhermanto. "Kiri Islam dan Ideologi Kaum Tertindas: Pembebasan Keterasingan Teologi menurut Hassan Hanafi". *Jurnal Al-Afkar*, Edisi V, Tahun ke 5 Januari-Juni 2002.
- Maharani, Dian. "Luthfi Hasan Ishaq Divonis 16 Tahun Penjara". *Koran Online Kompas.com*, 9 Desember 2013.
- Masduri. "Jalan Terakhir "Menebas Leher" Koruptor". *Duta Masyarakat*, 10 Desember 2012.
- "Reformasi Kacau Balau", *Sinar Harapan*, 23 Mei 2012.
- "Akil, Buku, dan Korupsi". *Radar Surabaya*, 23 Oktober 2013.

- "Disparitas Kekayaan Koruptor dengan Rakyat Miskin". *Sumut Pos*, 5 April 2013.
- "Jalan Terakhir "Menebas Leher" Koruptor". *Duta Masyarakat*, 10 Desember 2012.
- "Koruptor Generasi Gayus". *Republika*, 12 Desember 2012.
- "Pemuda dalam Pusaran Korupsi". *Tribun Timur*, 7 Maret 2013.
- Ni'am, Moh. Masyhuri dkk. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih*. Jakarta: TK GNPK NU, 2006.
- Rastika, Icha. "KPK Resmi Tetapkan Suryadharma sebagai Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji". *Koran Online Kompas.com*, 22 Mei 2014.
- "KPK Tetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali Tersangka". *Koran Online Kompas.com*, 22 Mei 2014.
- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam: antara Modernitas dan Posmodernisme; Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke-7, 2004.
- Soleh, A. Khudori. *Filsafat Islam: dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Sujana, Eggi. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books, 2008.
- Umam, M. Helmi. "Pandangan Islam tentang Korupsi". *Jurnal Teosofi*, Vol. 3 No. 2 Desember, 2013.
- Wattimena, Reza A. A. *Filsafat Anti-korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Wisnubrata, A. (ed.). "Berkas Kasus Korupsi Gayus Lengkap". *Koran Online Kompas.com*, 6 Mei 2011.